

■ **BPK Audit Aset KONI Kalbar**

Cornelis: Jangan Lagi Ada Telpon-telpon Saya

Abdul Khoir
Borneo Tribune, Pontianak

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis pada paripurna jawaban Pandangan Umum APBD 2010, Senin (1/8) kemarin menegaskan apa yang dilakukan pemerintah dimasa kepemimpinannya adalah kebijakan yang dimulai pada masa kepemimpinan yang lalu.

"Saat ini kami hanya cuci piring, dan hanya menjaga muka pemerintah," ucap pemimpin Kalbar ini.

Cornelis menegaskan dalam satu bulan penuh, 1-30 Agustus, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit secara menyeluruh aset KONI dan apapun hasil dari audit tersebut semua harus bisa menerima.

Gubernur juga mempersilahkan dewan untuk membentuk Pansus guna menelusuri aset-aset mana yang masih belum memiliki status hukum termasuk aset KONI, dan bagaimana kelanjutan aset tersebut apakah akan dihapus, mana yang akan dibatalkan dan

mana pejabat yang terkait untuk diproses hukum, dan diharapkan anggota dewan mendukung hal tersebut. "Hasil audit semua kita beresin, dan jika ada kawan yang terkena masalah tersebut jangan lagi ada telepon-telepon saya," kata Cornelis.

Gubernur menegaskan dirinya sangat menjunjung tinggi apapun hasil dari audit tersebut, dan dengan pentingnya hasil audit maka diharapkan semua pihak dapat profesional dan tidak melakukan hal-hal yang akan mencederai hasil audit

yang dilakukan oleh lembaga negara.

Gubernur mengambil langkah audit tersebut merupakan hasil konsultasi dengan BPK RI di Pontianak, BPK Pusat dan juga Kementerian Dalam Negeri, hal tersebut diperbolehkan, bahkan pasca audit aset KONI tersebut akan diteruskan terhadap aset-aset lain milik pemerintah.

Dan selain itu, pentingnya hasil audit BPK bagi pemerintah menempati posisi strategis, karena kasus lahan KONI tersebut mempengaruhi predikat terhadap

laporan keuangan. "Saya hampir disclaimer gara-gara kasus ini dan tidak dapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Cornelis.

Dan dengan hasil audit tersebut, jika ditemukan aset yang perlu dikeluarkan surat maka akan ditindaklanjuti untuk diterbitkan suratnya dan dianggarkan dengan persetujuan dewan, dan demikian juga pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk bersabar menunggu hasil audit dan tidak membuat proses audit menjadi terganggu. □